BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pemuda NEET di Provinsi Sumatera Barat tersebar di wilayah perkotaan dan perdesaan dengan proporsi lebih besar berada di wilayah perdesaan. Proporsi pemuda NEET yang tinggal di wilayah perdesaan adalah 53 persen pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 54 persen. Berdasarkan jenis kelamin, pemuda NEET didominasi oleh pemuda perempuan. Sementara itu, sebagian besar pemuda NEET di Sumatera Barat terdiri dari pemuda dengan status tidak menikah. Jika dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, mayoritas pemuda NEET mempunyai pendidikan ≥ SLTA. Pemuda NEET didominasi oleh pemuda yang mempunyai kepala rumah tangga yang berstatus kawin dan memiliki pendidikan < SLTA. Sebagian besar pemuda NEET merupakan pemuda yang tidak aktif secara ekonomi. Pada tahun 2017 terdapat 66,19 persen pemuda yang tidak aktif mencari pekerjaan dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 69,29 persen.

Dengan menggunakan regresi logistik diperoleh bahwa klasifikasi wilayah tempat tinggal, status perkawinan pemuda, tingkat pendidikan pemuda dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peluang seorang pemuda menjadi NEET. Pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi NEET dibandingkan dengan pemuda yang tinggal di wilayah perkotaan. Sementara itu, pemuda yang berstatus kawin akan mudah masuk ke dalam status NEET. Hal ini berkaitan dengan pemuda perempuan yang lebih mengutamakan untuk melakukan kegiatan rumah tangga ketika sudah menikah. Berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh hasil yang cukup kontradiktif dengan kebanyakan penelitian yang ada meskipun masih terdapat penelitian dengan hasil yang senada. Ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pemuda maka peluang seorang pemuda tersebut menjadi NEET akan semakin tinggi pula. Namun, pemuda yang memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan tinggi akan mempunyai peluang yang lebih kecil untuk menjadi pemuda NEET

Berdasarkan karakteristik penentu pemuda NEET di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan antara lain dengan meningkatkan pemerataan pembangunan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan; melakukan perbaikan pada sistem pendidikan sehingga lebih mengakomodir kebutuhan permintaan tenaga kerja dalam pasar kerja; meningkatkan kegiatan pelatihan kerja bagi pemuda yang tidak bekerja atau tidak dalam sistem pendidikan khususnya pemuda menikah yang tidak terlibat dalam pasar kerja; meningkatkan ketersediaan dan keterbukaan informasi terkait pelatihan kerja dan lowongan kerja khususnya bagi kaum muda; dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para pencari kerja khususnya kaum muda.

B. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis model pemuda NEET tahun 2017 dan 2018 di Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Pemerintah hendaknya terus meningkatkan pemerataan pembangunan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan.

   Pemerataan dipandang perlu karena dengan meningkatnya perekonomian dan sarana publik di wilayah perdesaan maka kesempatan kerja, pendidikan dan taraf kehidupan masyarakat akan ikut meningkat. Akses masyarakat terhadap pendidikan akan lebih mudah, disamping itu masyarakat termasuk pencari kerja usia muda memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian peluang seorang pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan untuk menjadi NEET akan semakin kecil. Sehingga proporsi pemuda NEET di wilayah perdesaan akan dapat dikurangi.

2. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan pada sistem pendidikan sehingga lebih mengakomodir kebutuhan permintaan tenaga kerja dalam pasar kerja.

   Perbaikan pada sistem pendidikan perlu dilakukan karena hasil penelitian menunjukkan pemuda NEET didominasi oleh pemuda dengan

pendidikan yang relatif cukup tinggi. Artinya pendidikan yang tinggi belumlah cukup sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dalam hal ini institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi perlu meningkatkan perannya menyiapkan peserta didik untuk terjun dalam pasar kerja. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki sistem dan kurikulum pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang berkompeten dan berkualiatas sehingga dapat bersaing di pasar kerja.
b. Mengembangkan program magang, bimbingan karir dan kewirausahaan pada sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.
c. Melibatkan sektor swasta dan stakeholder tekait dalam rancangan dan penyampaian pendidikan kejuruan, sehingga diperoleh keterkaitan dan kesepadanan (*Link and Match*) antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

3. Pemerintah hendaknya meningkatkan kegiatan pelatihan kerja bagi pemuda yang tidak bekerja atau tidak dalam sistem pendidikan.

   Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa status kawin pada pemuda meningkatkan peluang pemuda untuk menjadi NEET. Menyikapi hal ini pemerintah hendaknya meningkatkan kegiatan pelatihan kerja bagi pemuda khususnya pemuda NEET yang sudah menikah namun tidak terlibat dalam pasar kerja. Kegiatan pelatihan kerja dapat dilakukan dengan cara:

   a. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan melengkapi sarana dan prasarana, kualitas serta kuantitas pelatihan bagi peserta. Dengan demikian nantinya peserta dapat berwirausaha dengan menerapkan keterampilan yang diperoleh.
   b. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan swasta atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk melakukan pelatihan kerja serta magang bagi pemuda yang tidak bekerja dan tidak sekolah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

4. Pemerintah hendaknya meningkatkan ketersediaan dan keterbukaan informasi terkait pelatihan kerja dan lowongan kerja khususnya bagi kaum muda.

   Terkait hal ini, yang dapat dilakukan adalah:

   a. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan *job fair* secara berkala. Sehingga pencari kerja khususnya kaum muda dapat dengan mudah mengakses lapangan pekerjaan dan memilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
   b. Meminta kepada perusahaan untuk mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka baik melalui online maupun tidak online.
5. Pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para pencari kerja khususnya kaum muda.

   Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

   a. Memberikan kemudahan dalam pengurusan izin kepada pengusaha yang akan menjalankan usaha, terlebih pengusaha lokal yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja lokal.
   b. Membuat kebijakan yang mendukung dan memudahkan kaum muda untuk dapat berwirausaha.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA